



Pemkab Kulon Progo Targetkan Reformasi Kalurahan Segera Tercapai

KULON PROGO, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo terus mengupayakan reformasi kalurahan sesuai arahan pemerintah pusat. ;

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMK-PPKB) Kulon Progo, Muhadi, menyampaikan berbagai kegiatan dalam rangka reformasi kalurahan telah dimulai sejak 2024 lalu. "Saat itu ada lima kegiatan utama yang dilakukan dalam mendorong reformasi kalurahan," jelasnya pada Selasa (29/4).

Lima kegiatan utama tersebut meliputi pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan pelayanan publik, pengawasan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan data dan informasi. Menurut Muhadi, lima kegiatan tersebut masih dilanjutkan pada 2025 ini. Namun, pihaknya juga menambah empat kegiatan utama lainnya dalam mencapai target reformasi kalurahan.

"Empat kegiatannya adalah penguatan digitalisasi kalurahan, penguatan pengelolaan aset kalurahan, penguatan regulatif, serta penguatan sinergi pemerintah kalurahan dengan kapanewon," ujarnya.

Berbagai langkah percepatan terus dilakukan agar

target kegiatan reformasi kalurahan bisa tercapai. Seperti akselerasi penyelesaian berbagai regulasi, evaluasi kualitas belanja, melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dan pendampingan dalam kegiatan reformasi. Dukungan juga datang dari Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. Bentuknya berupa penyaluran anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan (Danais) untuk reformasi kalurahan senilai Rp100 juta per kalurahan. "Semoga target reformasi kalurahan bisa tercapai, termasuk harmonisasi antarpihak dalam rangka pemenuhan target," kata Muhadi.

Upaya harmonisasi salah

satunya dilakukan lewat Rapat Koordinasi (Rakor) di Aula Adikarta, Sekretariat Daerah Kulon Progo, Senin (28/4). Rakor dibuka oleh Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko. Ambar meminta partisipasi dan kerja sama seluruh pihak terkait dalam program reformasi kalurahan. Sebab, luasnya cakupan rencana aksi kegiatan utama reformasi kalurahan membuat pelaksanaannya perlu dilakukan secara lintas sektor.

"Khususnya para lurah dan Tim Pelaksana Reformasi Kalurahan agar melaksanakan kegiatan dengan semangat dan perspektif perbaikan tata kelola pemerintahan," jelas Ambar. (als)